

## HASAN TIRO: SEJARAH ACEH SEBAGAI PIJAKAN IDEOLOGI DALAM ACEH MERDEKA

### HASAN TIRO: HISTORY OF ACEH AS THE FOUNDATION OF IDEOLOGY INDEPENDENT ACEH

Monika Sari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>(Pend. Sejarah, FKIP, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>1</sup>[moenicha66@gmail.com](mailto:moenicha66@gmail.com)

#### **Abstrak**

*Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi khusus dari Pemerintah Pusat. Aceh dengan sejarah panjangnya yang menjadikan Aceh sebagai wilayah yang makmur secara sumber daya Alam terutama lada. Letak yang strategis dan memiliki daya pikat dalam hal perdagangan menjadikan Aceh sebagai Bandar perdagangan Internasional yang banyak dikunjungi oleh para pedagang asing baik dari Cina, Gujarat, India, Arab dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan Aceh sebagai wilayah yang memiliki tingkat multikulturalisme yang tinggi dalam kehidupan sosialnya. Namun ada beberapa factor yang menjadikan ketidakpuasan Aceh terhadap Pemerintah Pusat. Hasan Tiro bangkit menjadi tokoh yang menggerakkan Aceh Merdeka (GAM). Metode penelitian ini menggunakan metode studi literature. Dengan menggunakan berbagai literature untuk menelaah pemikiran Hasan Tiro dalam Ideologi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hasil penelitian yakni Pertama, Kesadaran masyarakat bahwa Aceh dalam sejarah adalah sebuah negara berdaulat jauh sebelum Indonesia ada. Kekuasaan Aceh meliputi hampir seluruh Sumatera dan negara Malaysia sekarang ini. Kekuasaan yang demikian besar sungguh tidak layak diturunkan menjadi hanya sebagai sebuah daerah dalam negara lain. Kedua, timbulnya penentangan terhadap Jakarta. Menurut masyarakat Aceh, sinkronisasi pemikiran Hasan Muhammad di Tiro sesuai dengan kondisi Aceh. Potensi alam dan kekhasan budaya Aceh dikhianati oleh Jakarta.*

**Kata Kunci :** *Hasan Tiro; Sejarah Aceh; Ideologi Aceh Merdeka; Gerakan Aceh Merdeka*

#### **Abstract**

*Aceh is one of the regions that received special autonomy from the Central Government. Aceh with a long history that makes Aceh a prosperous region in term of natural resources, especially pepper. Its strategic location and attractiveness in term of trade make Aceh a port of Internasional trade which is visited by many foreign trades from China, Gujarat, India, Arabia and so on. This makes Aceh an area that has a high level of multiculturalism in its special social life. However, there are several factors that contribute to Aceh's dissatisfaction the Central Government. Hasan Tiro became a prominent figure who moved FreeAceh (GAM). This research method use the literature study method. The result of this research are, the First public awareness that Aceh in history was a sovereign country long before Indonesia existed. Aceh power covers all of Sumatera and the state Malaysia today. Such a great power really does not deserve to be reduced to just a region in another country. Second, the emergency of opposition to Jakarta. According to the people of Aceh, The summary of Hasan Muhammad's Tiro thoughts is in accordance with the conditions of Aceh. Jakarta's natural potential and cultural peculiarities have been betrayed by Jakarta*

**Keywords:** *Hasan Tiro; History of Aceh; Free Aceh Ideology; Free Aceh Movement*

## **PENDAHULUAN**

Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Aceh juga memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanannya. Aceh pernah mengalami kejayaan abad ke-16 yakni dengan dijadikannya pelabuhan di Aceh menjadi salah satu bandar transit bagi perdagangan tidak hanya untuk wilayah yang ada di Indonesia saja melainkan untuk perdagangan dunia.

Kejayaan Aceh lainnya pada masa itu yakni Aceh sebagai penghasil lada terbesar. Adapun lada telah menjadi barang ekspor yang pokok. Ekspornya dahulu ke Tiongkok, sekarang mengalami sukses baru karena permintaan yang mendesak dari pedagang barat baik yang Islam maupun yang berbangsa Eropa (Lombard 1991:88)

Dengan dijadikannya Aceh sebagai Bandar transit perdagangan memungkinkan banyaknya para pedagang untuk berdagang. Di sini terdapat sejumlah pedagang-pedagang asing yang terdiri dari bermacam-macam bangsa, diantaranya terdapat pedagang-pedagang Cina, Gujarat, Portugis, Arab, Benggala dan Pegu. Di bidang keagamaan sebagaimana diberitakan oleh Ibn Batuttah dijelaskan tentang kehadiran para ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan (Poesponegoro, 2008). Ibn Batuttah menceritakan bagaimana taatnya Sultan Pasai terhadap agama Islam dari Madzhab Syafi'i dan ia selalu di kelilingi oleh ahli-ahli teologi.

Diantara ahli-ahli teologi tersebut ada yang berasal dari Persia yakni Qadi Syarif Amir Sayyid dari Syiraz dan Taj-al-Din dari Isfagan. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peran penting di dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena sangat erat hubungannya dengan Kerajaan Samudra Pasai lebih-lebih dengan mengadakan hubungan perkawinan antara putra-putra Sultan dari Pasai dengan Malaka abad ke 15 M. Hal ini membuktikan bahwa sejarah Aceh erat kaitannya dengan Islam.

Sejarah mencatat bahwa abad ke-17 merupakan periode Kerajaan Aceh telah mencapai masa keemasan. Kemajuan di segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah mampu diwujudkan. Dalam konteks keagamaan, kerajaan ini disebut sebagai pusat kekuatan Islam (*the champion of Islam*). Di Aceh, sebagaimana juga halnya di kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara, "kerajaan dan "Islam" adalah dua hal yang secara substansial tidak dapat dipisahkan. Demikian adanya, paling tidak pada tataran ideal (Hadi, 2010:171)

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari berbagai telaah literatur ini digunakan untuk mengidentifikasi pemikiran Hasan Tiro dalam menciptakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah Aceh**

Bangsa Aceh termasuk dalam rumpun bangsa Melayu, yaitu; Mantee (Bante), Lanun, Sakai Jakun, Semang (orang laut), Senui dan lain sebagainya, yang berasal dari negeri Perak dan Pahang di tanah Semenanjung Melayu. Semua bangsa tersebut erat hubungannya dengan bangsa Phonesia dari Babylonia dan bangsa Dravida di lembah sungai Indus dan Gangga, India. Bangsa Mante di Aceh awalnya mendiami Aceh Besar, khususnya di Kampung Seumileuk, yang juga disebut Gampong Rumoh Dua Blah. Letak kampung tersebut di atas Seulimum, antara Jantho dan Tangse. Seumileuk artinya dataran yang luas. Bangsa Mante inilah yang terus berkembang menjadi penduduk Aceh Lhee Sagoe (di Aceh Besar) yang kemudian ikut berpindah ke tempat-tempat lainnya. Sesudah tahun 400 Masehi, orang mulai menyebut "Aceh" dengan sebutan Rami atau Ramni. Orang-orang dari Tiongkok

menyebutnya lan li, lanwu li, nam wu li, dan nan poli yang nama sebenarnya menurut bahasa Aceh adalah Lam Muri. Sementara orang Melayu menyebutnya Lam Bri (Lamiri). Dalam catatan Gerini, nama Lambri adalah pengganti dari Rambri (Negeri Rama) yang terletak di Arakan (antara India Belakang dan Birma), yang merupakan perubahan dari sebutan Rama Bar atau Rama Bari (Zainuddin 1961:23).

Wilayah Aceh juga mengalami masa praaksara yakni zaman mesolitikum. Masa pra aksara di Aceh dibuktikan dengan penemuan sampah dapur yang berupa kulit kerang (*Kjokkenmoddinger*) di sepanjang pantai Timur (Langsa dan Tamiang) dan Sumatera Utara (Binjai dan sekitarnya). Begitu pula masa masuknya Islam di Aceh. Letak Aceh yang sangat strategis menjadikan Aceh sebagai Bandar perdagangan Internasional. Aceh menjadi daerah pertama yang dimasuki Islam. Hal ini dibuktikan dengan sudah terdapat nya pemukiman-pemukiman Arab di sepanjang pesisir Sumatera pada abad ke-7. Islam dibawa ke Aceh langsung dari para pedagang Arab. Hal ini menjadikan Islam sangat dengan dengan Aceh. Sebutan “Serambi Mekkah” juga sangat melekat dengan wilayah ini. Sejak saat itu mulai bermunculan Kesultanan-kesultanan Islam di Aceh dengan berbagai periode masa kejayaannya masing-masing.

Masa Belanda dibuktikan dengan perjuangan Aceh dalam melawan Belanda. Factor terjadinya adalah akibat kekecewaan terhadap sikap pendatang bangsa Barat. Perlawanan dilakukan baik dari kalangan rakyat biasa maupun tokoh-tokoh agama, dimana dikenal dengan sebutan Perang Aceh. Perlawanan ini berlangsung dalam periode yang sangat lama mulai dari 1873 sampai 1910 yang dibagi menjadi empat periode. Perang Aceh I pada 1873-1874 dimenangkan oleh Aceh dan tewasnya Kohler. Perang II 1874-1880. Perang Aceh III 1881-1896 muncul tokoh Perang Aceh yakni, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Teuku Cik Di Tiro, Cut Meutia. Perang Aceh IV 1896-1910 berlangsung secara sporadis. Begitupula dengan perjuangan melawan Jepang, Aceh juga terus melakukan perlawanan-perlawanan.

Aceh pasca kemerdekaan ditandai dengan terbentuknya sebuah organisasi yang disebut sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan ideologinya yakni ingin memisahkan Aceh dengan Indonesia. Gerakan ini merupakan konflik yang terjadi di Aceh yang disebabkan oleh berbagai hal yang menyebabkan sensitivitas bagi masyarakat Aceh. Penghianatan tentang kesepakatan hukum Islam dan ketidakpuasan akan pengelolaan sumber daya alam Aceh menjadikan konflik ini terus muncul.

### **Ideologi Gerakan Aceh Merdeka (GAM)**

Multikulturalisme sudah dijalankan Aceh sejak berabad-abad yang lalu yakni dibuktikan dengan Sultan yang selalu menerima dengan baik para pedagang-pedagang asing yang datang ke Aceh. Bahkan mereka membangun pemukiman mereka sendiri dan hidup damai berdampingan dengan pemukiman-pemukiman masyarakat Aceh lainnya. Sultan tidak pernah memperlakukan diskriminasi antar pedagang baik itu pedagang Islam maupun pedagang non-Islam. Begitu juga dalam hal hubungan perdagangan Sultan tidak pernah memilih rekan-rekan yang Islam saja dan menyingkirkan yang non-Islam. Tetapi semuanya diberlakukan secara sama tanpa ada perbedaan.

Nasionalisme Aceh juga begitu erat dibuktikan dengan Belanda yang tidak mampu menguasai Aceh dalam agresi yang dijelankannya. Perang panjang antara Aceh dan Belanda yang terjadi puluhan tahun dimulai dari April 1873, telah melahirkan sentiment anti kolonial yang sudah mengakar di hati rakyat Aceh. Bahkan Belanda harus mengutus Snouck Hourgnye yang belajar Islam lama di Arab untuk diutus masuk ke Aceh sebagai penyusup untuk mengetahui strategi perang Aceh. Hal ini dilakukan agar Aceh dapat ditakhlukkan oleh Belanda. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Aceh tidak bisa dipisahkan dengan Islam sejak abad ke-13. Sehingga ini terus mereka wariskan kepada generasi-generasi penerusnya. Hal ini yang membuat sejarah Aceh berbeda dengan sejarah daerah lainnya. Kejayaan dan kegemilangan sejarah Aceh membuat Hasa Tiro memiliki pandangan tersendiri tentang konsep suatu Negara.

Sebagian beranggapan bahwa keberadaan Aceh di dalam Indonesia sejalan dengan proses kesejarahan kedua belah pihak, karena menghadapi penindasan yang sama, memiliki nasib yang sama dan oleh karena itu Aceh dan Indonesia pantas untuk membangun cita-cita Nasionalisme bersama. George T. Kahin yang di dalam tulisannya mengenai Nasionalisme dan Revolusi Indonesia menggambarkan bahwa ‘Pemerintah Belanda mendorong banyak patriotisme lokal di kepulauan ini ke dalam satu pelukan patriotisme bersama (Kahin, 1952: 37). Ia katakan begitu karena sebenarnya tidak ada sebuah ekspresi geografis mengenai Indonesia sebelum kedatangan kolonial Belanda. Lebih jauh dia menggambarkan bahwa dasar pembentukan Nasionalisme Indonesia, bermula dari perkembangan kebanggaan komunitas, yang kemudian dipersatukan oleh agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk kepulauan ini, perasaan senasib diperlakukan tidak adil oleh kolonial Belanda serta munculnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang diterima banyak pihak (Damanik, 2010:28).

Dukungan para ulama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa itu bukan tanpa syarat. Soekarno diminta untuk menandatangani perjanjian untuk menegakkan Syariat Islam di Aceh. Namun janji yang tak kunjung dipenuhi membuat Daud Beureueh menyatakan bergabung dengan Darul Islam Indonesia. Sehingga pada masa pemberontakan DI/TII dan perlawanan di masa GAM terus menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Aceh dimana sebenarnya posisi Aceh di Indonesia sehingga muncul permintaan rakyat Aceh untuk referendum pada masa itu. Yang menjadi puncak kekecewaan adalah presiden Soekarno yang berpidato di Amuntai, Kalimantan pada tanggal 27 Januari 1953 menolak Islam sebagai dasar Negara.

Berbeda dengan Darul Islam pimpinan Abu Beureueh, Deklarasi Kemerdekaan Aceh juga sama sekali tak menyinggung isu agama dan cenderung sekuler (*secular in nature*). Meski pun dalam berbagai dokumen tertulis maupun pernyataan lainnya, Qur’an disebutkan sebagai konstitusi negara, tapi penyebutan ini lebih bersifat insidental. Bahkan, di masa 1980-an dimana GAM kembali muncul dan isu mendirikan negara Islam sudah lebih eksplisit dinyatakan, tetap saja isu utama organisasi perlawanan ini adalah melawan kolonialisme Jawa yang mereka anggap telah menduduki wilayah tanah air dan kekayaan alam Aceh (Kell, 1995: 64).

Pemberontakan ini juga memiliki akar yang kuat di dalam perubahan sosial, politik dan ekonomi yang terjadi begitu cepat di Aceh pada masa Orde Baru. Di satu sisi, eksplorasi sumber daya alam besar-besaran yang tidak mengimbas kepada kesejahteraan rakyat Aceh, telah menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama di daerah pedesaan. Di sisi lain, sentralisasi dan penetrasi birokrasi sipil dan militer dari pusat terhadap Aceh, telah mengeliminasi kekuatan-kekuatan politik lokal yang ada selama ini. Perasaan kecewa diperlakukan pusat dan di tengah-tengah kekosongan kepemimpinan alternatif di Aceh, memberikan peluang kepada Tiro dan GAM untuk tampil mengartikulasikan identitas politik Aceh (Damanik, 2010: 33-34).

Hasan Tiro merupakan pemimpin tertinggi kemerdekaan Aceh. Hasan Muhammad di Tiro merupakan deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 di kawasan gunung Halimon Pidie. Hasan Muhammad di Tiro ikut keluar masuk hutan bersama pasukannya sejak 1976 untuk memperjuangkan pemisahan Aceh dari Indonesia. Perjuangannya secara bergerilya dalam belantara hutan Aceh itu hanya berlangsung tiga tahun. Kemudian pada 28 Maret 1979 Hasan Muhammad di Tiro hijrah ke Malaysia melalui Batee Iliék menggunakan perahu nelayan. Bermuara pada permintaan suaka politik pada Swedia sebelum akhirnya menetap di Stockholm, ibukota Swedia. Dari perjalanannya itu kemudian memulai membangun jaringan GAM di luar negeri, mencari dukungan internasional dan juga untuk menyelamatkan perjuangan GAM secara ideologis. Bahkan Hasan Muhammad di Tiro juga pernah mengirimkan surat Gerakan Aceh Merdeka kepada Sekretaris Jenderal Kofi Annan PBB pada 25 Januari 1999 (Mukhlis 2011:14).

Menurut Tiro, ratusan tahun sebelum Indonesia terbentuk, Aceh telah menjadi sebuah entitas politik sendiri, yang bukan saja besar dan makmur, tetapi juga diakui dunia internasional. Misalnya, tujuh tahun sebelum invasi pertama Belanda tahun 1873, Larouse Grand Dictionaries Universelle telah menggambarkan bahwa Aceh-Sumatera adalah suatu bangsa yang dominan di Indie. Informasi yang sama ditulis oleh La Grande Encyclopedie tahun 1874 juga menjelaskan kekuatan *Atchin* atau *Achem* yang dahsyat bertempur melawan serangan Portugis pada tahun 1582, dan bangsa ini tak terkalahkan. Sementara Damste dalam bukunya *Het Volk van Atjeh* menurut Tiro juga menyatakan bahwa ‘dari awal abad 17 perbatasan Aceh di Sumatera telah mencapai Selatan sampai Palembang dan Bengkulu dan di Semenanjung Malaya termasuk Perak, Kedah dan Pahang (Damanik, 2010:47).

Tiro beranggapan bahwa Aceh dan sejarahnya tidak dapat terpisahkan dengan Indonesia, menjadikannya bagian dari satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Dengan harapan bahwa Indonesia memiliki sejarah bersama menjadi kekuatan dalam perumusan konsepsi sejarah Indonesia. Tiro berharap bahwa Islam dan masyarakat yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memerdekakan Indonesia dapat bisa dijadikan sebagai suatu falsafah dan ideologi dasar Negara Indonesia. Dan Hasan Tiro bercita-cita untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia.

Pertentangan ideologi dan konsepsi Negara dimasa awal Indonesia terbentuk menjadi alasan Hasan Tiro untuk melawan. Selaras dengannya, sejarah Aceh pun tidak menjadi alasan utama Tiro untuk bangkit melawan Indonesia. Faktor pertentangan ideologi yang berimbas

terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia saat itu (Aceh khususnya) menuntut Tiro untuk menjadikan sejarah sebagaimana ancaman Tiro pada tahun 1958 sebagai instrumen politik untuk melawan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penulisan sejarah-sejarah Aceh yang dipisahkan dengan sejarah Indonesia. Sehingga nasionalisme Indonesia dianggap tabu oleh rakyat Aceh.

Bangsa atau nasion ialah komunitas politik yang dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan (Anderson, 1991:7). Bangsa adalah sesuatu yang *inajiner* karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota lain itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Dalam hal ini, secara bertahap bagi Aceh komunitas terbayang Indonesia semula merupakan '*collective social imaginary*', kemudian mulai melepaskan diri dari kolektifitas tersebut serta bertransformasi ke dalam Darul Islam Indonesia. Perubahan ini merupakan satu cara pandang di dalam mencari solusi untuk seluruh krisis politik, baik di Indonesia maupun di Aceh. Krisis politik ini bahkan belakangan ditransformasikan kembali ke dalam *new collective imaginary*, yakni Aceh Merdeka, berdasarkan kepada masa lalu dan kejayaan kesultanan Aceh, namun sama sekali terlepas dari Indonesia, tanpa perlu membentuk garis sambung apa pun.

Hasan Tiro menyadari bahwa untuk membuat suatu gerakan pembebasan, Aceh Merdeka yang dibangun oleh Hasan Tiro harus memiliki suatu pondasi ideologis, sehingga tidak dianggap sebagai suatu gerakan yang tidak punya landasan apa-apa dalam pembentukannya. Selain itu juga tidak dianggap sebagai suatu gerakan yang tidak memiliki pondasi sehingga dianggap gerakan yang kriminal dan teroris. Sehingga berdasarkan pandangan ini Hasan Tiro menjadikan sejarah Aceh sebagai landasan pijakan untuk gerakan pembebasan ini yang sering dikenal dengan istilah Aceh Merdeka.

Pemikiran Politik Hasan Muhammad di Tiro Tentang Konsepsi Negara Bangsa merupakan ide-ide yang dikemukakan oleh Hasan Muhammad di Tiro bagaimana membentuk negara yang ideal dari sebuah entitas yang sama. Yang pada dasarnya Aceh merupakan bekas Kerajaan Aceh Darussalam yang pernah berdaulat dan diakui oleh Internasional. Hasan Tiro berhasil menjadikan sejarah Aceh tidak hanya sebagai identitas dan jati diri, tetapi lebih dari sekedar itu bahwa sejarah sebagai argumen hukum untuk melakukan perlawanan atas setiap penjajahan baik itu dijajah oleh asing maupun dijajah oleh bangsannya sendiri.

Pemikiran politik tidak terlepas dari kajian mengenai institusi sebuah negara, karena pemikiran politik merupakan satu kesatuan yang terjalin antara ide, doktrin, konsep dan teori tentang eksistensi negara. Pemikiran Hasan Muhammad di Tiro mengenai negara bangsa adalah mengenai pendirian negara sambungan Kerajaan Aceh yang berdasarkan dari sebuah ikatan bersama sebagai sebuah kesatuan yaitu Islam. Di mana Aceh adalah sebuah negarayang merdeka dan berdaulat sejak ratusan tahun silam. Hasan Muhammad di Tiro menggugat penyerahan kedaulatan Aceh kepada RIS oleh Belanda serta memperkuat landasan gugatannya dengan hukum Internasional.

Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Disamping wilayah yang luas ini juga Indonesia memiliki keberagaman baik itu dari segi budaya, agama, adat istiadat dan keanekaragaman etnis yang tergabung menjadi satu di dalam payung yang dinamakan Indonesia. Hasan Tiro berfikir bahwa masing-masing wilayah tidak mungkin disatukan kemudian dipimpin oleh suku yang dominan. Sehingga Hasan Tiro beranggapan bahwa Indonesia cocok dijadikan sebagai Negara yang federal. Sehingga keberagaman Indonesia dapat di kelola dengan baik oleh Negara. Keleluasaan pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi lokal menjadi kekuatan utama yang menjadikan Negara ini maju.

Hasan Tiro juga menyebutkan bahwa Nasionalisme Indonesia bukanlah Nasionalisme Indonesia melainkan Imprealisme untuk membenarkan penjajahan baru, yakni penjajahan oleh bangsa yang menguasai pusat pemerintahan di Pulau Jawa. Sekarang ini nasionalisme Indonesia sudah dijadikan ideology Negara untuk menjamin atau membenarkan penguasaan bangsa Jawa atas tanah air bangsa-bangsa lain di luar Pulau Jawa (Hasan:6) .Muhammad Hasan di Tiro mengungkapkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak dapat dipahami sebagai satu kesatuan dari sebuah sejarah penderitaan yang sama akibat penjajahan Belanda yang didasarkan pada letak geografis.

Karena sejarah Aceh yang mencatat tentang perjuangan rakyat Aceh dalam mengusir Belanda merupakan upaya rakyat Aceh untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda bukan perjuangan untuk memerdekakan Indonesia dari Belanda. Sehingga jauh sebelum Indonesia terbentuk Aceh sudah memiliki rasa Nasionalisme yang besar terhadap wilayahnya untuk tetap mempertahankan harga diri, kehormatan, dan kedaulatan wilayah Aceh agar Belanda tidak bisa menguasai Aceh.

Hasan Muhammad di Tiro merekonstruksi sejarah Aceh dengan realitas bahwa Aceh telah dilebur sebagai salah sebuah Provinsi dalam NKRI, yang meski pun datang dari berbagai jalan sejarah yang berbeda, bahkan juga semangat dan nilai perjuangan yang tidak sepenuhnya sama, dipadukan ke dalam satu kehendak untuk mempertahankan sebuah warisan asal usul sejarah bangsa Aceh, atau sebuah martabat yang di dalamnya ada unsur religiusitas sekaligus kebanggaan sejarah dan etnis.

Kehendak bersama yang dirumuskan Hasan Muhammad di Tiro tersebut, di sisi lain diantagonisasikan dengan *the imagined community Indonesia*, yang sebelumnya pernah terdapat harapan besar bagi hadirnya kembali kejayaan suatu kelompok bangsa-bangsa yang terbebas dari kolonial Belanda. Namun persaudaraan horizontal (*a horizontal comradeship*), meskipun berasal dari latar belakang dan suku yang berbeda tetapi merasa senasib karena pernah sama-sama ditindas kolonial Belanda serta memiliki kesamaan agama, yakni Islam di dalam sebuah *collective imaginary* yang sama, yakni Indonesia.

Indonesia terlalu luas untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan yang diatur oleh sentralistik di Jakarta. Pancasila sebagai asas negara Indonesia bukanlah falsafah, ia hanya sebagai lambang yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Hasan Muhammad di Tiro berpendapat bahwa Islam lah yang dijadikan falsafah hidup dan ideologi negara karena ia hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Dengan mengakui Islam sebagai

asas persatuan Indonesia, tidaklah berarti menafikan golongan rakyat Indonesia yang beragama non-muslim. Al-Quran Hadits telah memuat berbagai hukum yang bisa menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Aceh sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam dulu.

Ditambah dengan sosio kultural Aceh yang telah hidup dalam Islam selama berabad-abad, maka Islam sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Dan kemudian menjadi sebuah kesatuan dalam berbagai tatanan kehidupan di Aceh. Dalam mempertahankan Islam, bangsa Aceh rela mengorbankan nyawa dan hartanya. Akan tetapi kemudian pemaksaan Pancasila dan segala konsep Nusantara merupakan cara pandang etnosentrisme budaya Jawa yang direfleksikan dalam Indonesia modern. Di sini kemudian menimbulkan pertentangan nurani dan ideologi yang besar bagi Aceh dan bangsa lainnya di Nusantara yang menganut Islam. Falsafah atau ideologi Pancasila tidak mengakar kuat dalam benak rakyat Indonesia, karena tidak dikenal sebelumnya.

Hasan Muhammad di Tiro berusaha membangkitkan kembali kesadaran masyarakat bahwa Aceh dalam sejarah adalah sebuah negara berdaulat jauh sebelum Indonesia ada. Kekuasaan Aceh meliputi hampir seluruh Sumatera dan sebagian Malaysia. Kekuasaan yang demikian besar sungguh tidak layak diturunkan menjadi hanya sebagai sebuah daerah dalam negara lain. Aceh seharusnya adalah sebuah negara dan daerah-daerah lain adalah sebuah daerah taklukan yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Aceh. Hasan Muhammad di Tiro mengatakan, sungguh sangat hina jika saat ini Aceh diletakkan sebagai sebuah Provinsi di bawah Indonesia yang baru lahir pada tahun 1945.

Masyarakat Aceh mengsinkronisasikan pemikiran Hasan Muhammad di Tiro dengan keadaan Aceh di mana potensi alam dan kekhasan budaya Aceh dikhianati oleh Jakarta. Hasil kekayaan alam Aceh yang ada selama ini semuanya diangkut ke Jakarta. Pemerintah pusat mengurus hasil alam Aceh untuk kepentingan elit politiknya. Sementara masyarakat Aceh sendiri yang seharusnya "pemilik" kekayaan itu hanya melihat dan menyaksikan kekayaan alam mereka diangkut ke Jakarta. Di sinilah muncul sebuah adigium: "Buya krueng teu dong-dong, buya tamong meuraseuki." Ini semakin diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang tidak peduli dengan beberapa janjinya untuk merealisasi aspek keistimewaan tertentu yang ada di Aceh setelah mereka menjanjikannya.

Hasan menganggap praktik ini adalah pengkhianatan dan pembohongan yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Aceh. Penyebab utama konflik di Aceh mempunyai akar sejarah panjang yang merupakan akumulasi ketidakadilan dalam bidang politik, sosial agama, ekonomi dan HAM. Di era Sukarno, Aceh sebagai "daerah modal" kemerdekaan mengalami kekecewaan melalui "degradasi politik" dimana tidak dipenuhinya janji pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh yang berupa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh serta penurunan status Propinsi Aceh. Setelah itu janji perdamaian dengan keistimewaan dalam agama dan pendidikan tidak pula dilaksanakan.

Terdapat dua poin penting di mana pemikiran Hasan Muhammad di Tiro berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pertama, bangkitnya nasionalisme bangsa Aceh. Kesadaran masyarakat bahwa Aceh dalam sejarah adalah sebuah negara berdaulat jauh



sebelum Indonesia ada. Kekuasaan Aceh meliputi hampir seluruh Sumatera dan negara Malaysia sekarang ini. Kekuasaan yang demikian besar sungguh tidak layak diturunkan menjadi hanya sebagai sebuah daerah dalam negara lain. Kedua, timbulnya penentangan terhadap Jakarta. Menurut masyarakat Aceh, sinkronisasi pemikiran Hasan Muhammad di Tiro sesuai dengan kondisi Aceh. Potensi alam dan kekhasan budaya Aceh dikhianati oleh Jakarta.

Namun dewasa ini Aceh sudah diberikan status sebagai daerah otonom serta predikat keistimewaan dibidang keagamaan, peradatan dan pendidikan. Mengenai pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, telah dibentuk beberapa undang- undang sebagai dasar atau landasan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, yaitu Undang- Undang No.3 Tahun 1909 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan. Namun demikian, status keistimewaan yang diberikan tersebut tidak dapat direalisasikan dalam masyarakat karena tidak didukung oleh peraturan- peraturan pelaksana yang lain. Kemudian baru pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang di dalamnya memuat tentang syari'at Islam dan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dapat dilaksanakan.

#### **KESIMPULAN**

Hasan Tiro menjadikan sejarah Aceh sebagai landasan pijakan untuk gerakan pembebasan yang dikenal dengan istilah Aceh Merdeka. Hasan Muhammad di Tiro berusaha membangkitkan kembali kesadaran masyarakat bahwa Aceh dalam sejarah adalah sebuah negara berdaulat jauh sebelum Indonesia ada. Kekuasaan Aceh meliputi hampir seluruh Sumatera dan sebagian Malaysia. Kekuasaan yang demikian besar sungguh tidak layak diturunkan menjadi hanya sebagai sebuah daerah dalam negara lain. Aceh seharusnya adalah sebuah negara dan daerah-daerah lain adalah sebuah daerah taklukan yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Aceh. Hasan Muhammad Tiro mengatakan, sungguh sangat hina jika saat ini Aceh diletakkan sebagai sebuah Provinsi di bawah Indonesia yang baru lahir pada tahun 1945.

#### **REFERENSI**

- Arifin, Adam Mukhlis. 2011. *Demokrasi Aceh Mengubur Ideologi*. Takengon: The Gayo Institute.
- Anderson, Benedict. 1991. *Komunita-Komunitas Inajiner: Renungan tentang asal-usul dan penyebaran Nasionalisme*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan INSIST Press
- Damanik, Ahmad Taufan. 2010. *Hasan Tiro dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*. Jakarta : Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI)
- Hadi, Amirul. 2010. *Aceh : Sejarah, Budaya dan Tradisi*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia
- Zulfiadi Effendi, Hasan. *Pemikiran Politik Hasan Muhammad Di Tiro Tentang Konsep Negara Bangsa*. Jurnal Ilmu Politik, FISIP. Universitas Syiah Kuala. Diakses pada 23 Mei 2022

- Kahin, George McTurnan. 1952. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu
- Lombard, Denys. 1991. *Kerajaan Aceh : Jaman Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta : Balai Pustaka
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1990. *Pemberontakan kaum republik: kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Zainuddin. 1961. *Tarich Atjeh Dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda